

EVALUASI KESELARASAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ELECTRONIC GOVERNMENT ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI JAWA TENGAH, DAN KABUPATEN/ KOTA (KOTA TEGAL DAN KABUPATEN BATANG)

Oleh : Rihandoyo dan Amni Zarkasyi Rahman

Abstract : E Gov development is directed to develop electronic-based governance in order to improve the quality of public services effectively and efficiently. However, since the launch of Inpres No. 3 Tahun 2003 about policies and development strategies of e gov 10 years ago, the development of e-gov in central and local government has not been in line with expectations. Based on e-gov rank results by United Nation Public Administration Network (UNPAN) put Indonesia in the position 97th in the world, while the results of "Pemeringkatan e-Government Indonesia" (PeGI) show that the Central Java Province, Tegal City and Batang Regency showed less of development outcomes. This was due to the absence of policy harmony between the central and local level to support the development of e gov, there not the institutional care of the synchronous e gov and a strong legal regulation for e gov can regulate development in Indonesia.

Key Words : e-gov, Harmony, Policy, Institution, Regulation

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan komunikasi telah mendorong perkembangan *electronic government* (*e-gov*) di seluruh dunia dan telah merubah pelayanan publik dari pemerintah ke publik sentris. Di Indonesia Pengembangan *e-gov* diarahkan untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-gov* (*e-government Development Framework*) melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang merupakan payung bagi seluruh kebijakan detail teknis di bidang *e-gov*. Agar kebijakan pengembangan *e-gov* dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu, maka masih diperlukan peraturan, standarisasi dan panduan yang konsisten dan saling mendukung.

Inpres tersebut pemerintah pusat telah memberikan panduan seluruh jajaran yang ada dibawahnya baik pemerintah daerah maupun kementerian untuk melaksanakan pembangunan *e-gov* guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta peningkatan pelayanan publik. Namun pada kenyataannya banyak pemerintah daerah maupun kementerian yang menjalankan pembangunan *e-gov*

setengah hati, sehingga tujuan pembangunan *e-gov* belum mencapai tujuan seperti yang diharapkan.

Di dalam sebuah *proceeding* yang dipresentasikan di *Pacific Asia Conference on Information Systems* (PACIS) tahun 2012 Nurdin dkk, menjelaskan status *e-gov* di Indonesia dengan menggunakan *e-gov* model *benchmarking* dari PBB, serta menggunakan data dari Kementerian Dalam Negeri Indonesia, telah meneliti 353 website pemerintah lokal dari awal Maret sampai akhir Mei 2011. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas website pemerintah daerah (193) masih pada tahap awal, 98 berada pada tahap *enhance* (informasi), 61 berada pada tahap interaktif, dan hanya satu situs web pemerintah daerah telah mencapai tahap transaksi. Tak satu pun dari *e-gov* website lokal telah pindah ke tahap akhir dari *e-gov* sesuai dengan model PBB. Temuan kami juga menunjukkan bahwa beberapa *websites* pemerintah daerah tidak dikelola dan dipelihara dengan baik serta website pemerintah daerah tidak memenuhi persyaratan standarisasi pemerintah pusat yang telah digariskan dalam cetak biru *e-gov*.

Electronic Government di dunia seolah menjadi sebuah *trend mode* dan berkembang dengan cepat sehingga muncul berbagai tanggapan terhadap keberadaan *e-gov* tersebut. *United Nation Development Programme* (UNDP) menyatakan definisi *electronic government* yang lebih sederhana yaitu

"E Government is the Application of information and communication technology (ICT) by government agencies" (Indrajit, 2004, 3)

Menurut Indrajit setidaknya terdapat tiga karakteristik definisi dari *e-gov* yaitu : (1) Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan; (2) Melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; dan (3) Memperbaiki mutu pelayanan yang sedang berjalan.

Menurut Indrajit, berdasarkan hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government, untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah: *Support*, *Capacity*, dan *Value*.

Support merupakan elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *e-gov*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *e-gov*. Tanpa adanya unsur "*political will*" ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-gov* dapat berjalan dengan mulus.

Capacity adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan "*impian*" *e-gov* terkait menajdi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu: ketersediaan sumber daya, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, dan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan.

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif *e-gov* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-gov* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (*demand side*). Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *e-gov* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar

benar-benar memberikan *value* (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep *e-gov*.

Seperti pembangunan pada bidang-bidang yang lain, salah satu tahapan penting untuk mengawal keberhasilan pencapaian tujuan adalah tahapan evaluasi. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 menyatakan bahwa evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Demikian pula Evaluasi pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu dari empat tahapan perencanaan pembangunan nasional, yang meliputi: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Sebagai suatu tahapan dalam perencanaan pembangunan nasional, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif sehingga dapat mengidentifikasi sampai sejauh mana tingkat pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan nasional terhadap target-target yang telah ditetapkan. Keberhasilan kinerja pembangunan nasional harus didukung oleh kinerja pembangunan daerah.

Metode Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu ditelaah bagaimanakah pelaksanaan kebijakan pembangunan *e-gov* Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kota? Selanjutnya perlu juga ditelaah apakah terdapat keselarasan pembangunan *e-gov* Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kota. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan solusi agar pembangunan *e-gov* antara pemerintah pusat dan daerah agar tetap selaras.

Di dalam rangka menelaah hal tersebut maka penelitian ini menggunakan penelitian *Interpretivisme*, atau pendekatan kualitatif, adalah cara untuk mendapatkan wawasan dengan menemukan makna dengan meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan-kebijakan *e-gov* baik pusat maupun daerah. jenis penelitian

deskriptif, dengan menggunakan pendekatan Kualitatif dalam menjabarkan lokus kebijakan pembangunan *e-gov* pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kota. Fokus atau ruang lingkup dalam penelitian ini adalah keselarasan kebijakan *e-gov* antara lokus kebijakan pembangunan *e-gov* pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kota.

Hasil Penelitian

Berdasarkan Pemingkat pembangunan e gov seluruh negara di dunia yang dilakukan oleh *United Nation Public Administration Network* (UNPAN), menempatkan Indonesia di urutan 97 dibawah Singapore, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam dan Thailand. Posisi tersebut tentunya menjadi tantangan bagi Pembangunan *e-gov* di Indonesia agar mampu sejajar dengan negara-negara lain terutama di negara ASEAN.

Pada tingkat Provinsi, pada tahun 2012 terdapat 24 dari 34 Provinsi di Indonesia mengikuti Pemingkatan e-Government Indonesia (PeGI). Hasil pemingkatan *e-gov* untuk seluruh provinsi

yang mengikuti PeGI berdasarkan kategori penilaian terhadap 24 provinsi tersebut, 29,17% provinsi berada pada kategori BAIK, 58,33% provinsi berada pada kategori KURANG dan sebanyak 12,50% provinsi berada pada kategori SANGAT KURANG.

Provinsi Jawa Tengah berdasarakan hasil asesmen tersebut secara keseluruhan dimensi menunjukkan bahwa penerapan *e-gov* di daerah ini masih kurang. Hasil asesmen keseluruhan dimensi untuk Kabupaten Batang adalah kurang. Sedangkan untuk Kota Tegal pada tahun 2012 tidak mengikuti PeGI yang diadakan oleh Kementerian Kominfo sehingga tidak diperoleh data pemingkat e gov untuk menggambarkan pembangunan *e-gov* Kota Tegal. Namun, berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan *Grand Desain e-gov* Kota Tegal dapat diperoleh gambaran pembangunan *e-gov* kota Tegal belum sesuai harapan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa visi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Tegal dan Pemerintah Kabupaten Batang dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Perbandingan Visi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Tegal dan Pemerintah Kabupaten Batang

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kota Tegal	Pemerintah Kab. Batang
Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan	Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera	Terwujudnya masyarakat yang bermoral, berbudaya, dan berdaya saing untuk memperkuat Kota Tegal sebagai pusat perdagangan, jasa, industri dan maritim menuju masyarakat yang partisipatif dan sejahtera	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan profesional, untuk penguatan ekonomi daerah, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Batang

Sumber : Olah data Peneliti

Keselarasan visi pembangunan dalam pengembangan *e-gov* terlihat dalam rumusan visi, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/ kabupaten. Rumusan itu terangkum dalam definisi makna "sejahtera".

Keselarasan misi pembangunana dalam pengembangan *e-gov* dalam pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/ kabupaten terlihat pada table berikut ini :

Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Tegal belum secara eksplisit menyebutkan penggunaan teknologi informasi dalam strategi pembangunannya.

Analisis keselarasan arah kebijakan pembangunan pengembangan *e-gov* antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/ kabupaten diketahui bahwa meskipun terdapat upaya untuk peningkatan

Tabel 2

Keselarasan Misi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Tegal dan Pemerintah Kabupaten Batang

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kota Tegal	Pemerintah Kab. Batang
Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera salah satunya dengan penguasaan IPTEK dan TIK	Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur sebagai pelayan masyarakat	Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan integritas SDM aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (goodgovernance).	Misi 1 : Mengembangkan penataan dan pembinaan birokrasi di semua tingkatan demi terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berpelayanan publik yang prima.

Sumber : Olah Data Peneliti

Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa terdapat keselarasan misi pembangunan dalam pengembangan *e-gov*. Hal ini terlihat melalui keselarasan misi pembangunan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang bersih dan professional dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengembangan *e-gov* merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan *Good Governance*.

Pembahasan

Analisis keselarasan strategi pengembangan *e-gov*, dengan melihat salah satu prioritas pembangunan nasional, dengan strategi Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas. Dalam rangka perwujudan tujuan *e-gov* tersebut Pemerintah Pusat dan Kabupaten Batang secara eksplisit telah menyebutkan bahwa perwujudan tujuan *e-gov* dilakukan dengan mengembangkan penggunaan teknologi informasi.

kualitas pelayanan publik dan transparansi informasi kepada masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi (TI). Pada strategi tersebut, hanya pemerintah provinsi saja yang secara eksplisit menyebutkan penggunaan *e-gov*, semetara itu di Kabupaten Batang menyebutkan penggunaan transparansi informasi guna peningkatan pelayanan publik.

Analisis Kelembagaan menunjukkan bahwa peranan aspek kelembagaan dan legalitas atau regulasi sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pembangunan *e-gov*. Di dalam pembangunan *e-gov*, kelembagaan merupakan salah satu masalah, hal ini dapat terlihat pada pembangunan *e-gov* di pemerintah pusat dikelola secara khusus oleh direktur *e-gov* dibawah Direktur Jederal Aplikasi Informatika. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menganggap pembangunan *e-gov* merupakan hal yang cukup penting dalam rangka mencapai salah satu tujuan

pembangunan, yaitu *good government*. Keberadaan direktorat *e-gov* ini dianggap penting sehingga pemerintah secara khusus mengalokasikan dana guna pembangunan *e-gov*. Akan tetapi, kondisi di daerah, baik Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan, pembangunan *e-gov* bukan sesuatu yang dianggap penting sehingga pengelolaannya berada dibawah bidang komunikasi dan informatika seksi pengembangan komunikasi dan informasi yang tidak secara khusus menangani pembangunan *e-gov*. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada keselarasan kepentingan antara pusat dan daerah, secara kelembagaan pemerintah pusat tidak mempunyai "kaki" di lembaga pemerintah daerah.

Salah satu strategi pembangunan *e-gov* yang disebutkan dalam stranas adalah menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Hal tersebut harus ditunjang dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja di semua instansi pemerintah pusat dan daerah. Penataan sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah harus dirancang agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.

Penataan tersebut salah satunya dilakukan dengan rasionalisasi peraturan dan prosedur operasi, termasuk semua tahapan perubahan, perlu diperkuat dengan landasan peraturan dan prosedur operasi yang berorientasi pada organisasi peraturan tertinggi yang dikeluarkan pemerintah pusat sampai saat ini adalah Inpres no 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-gov*. Menurut Jimly Asshiddiqie di dalam bukunya yang berjudul "Perihal Undang-Undang" menyatakan bahwa Inpres hanya merupakan *policy rules*, yaitu bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang biasa. Disebut "*policy*" atau kebijakan karena secara formal tidak dapat disebut atau memang bukan berbentuk peraturan yang resmi. (Asshiddiqie, 2005, 10)

Seharusnya agar pembangunan *e-gov* mempunyai kekuatan hukum untuk mengatur, aturan tersebut paling tidak berbentuk keputusan presiden atau peraturan presiden yang bersifat mengatur dan mempunyai kekuatan hukum. Keputusan Presiden (Keppres) adalah keputusan yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah telah melakukan pembangunan *e-gov* diawali dengan dikeluarkannya Inpres 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan *e-gov*.
2. Hasil Pemeringkat Pembangunan *e-gov* Jawa Tengah dikategorikan Kurang; Hasil Pemeringkat Pembangunan *e-gov* Kabupaten Batang dikategorikan Kurang; Kota Tegal pada Tahun 2012 tidak mengikuti pemeringkat *e-gov* sehingga sulit untuk diketahui hasil pembangunannya.
3. Keselarasan Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi Pembangunan *e-gov* antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Tengah, Kota Tegal dan Kabupaten Batang menunjukkan semuanya sudah menuangkan visi dan misi pembangunan yang selaras dengan tujuan *e-gov* yaitu salah peningkatan pelayanan dan pencapaian *good government*. Belum terlihat adanya komitmen dalam tatanan kebijakan dan strategi pencapaian visi dan misi tersebut dengan mengembangkan TIK atau *e-gov*.
4. Salah satu hambatan yang muncul dalam pembangunan *e-gov* adalah tidak adanya kelembagaan yang dapat mengkoordinir dan mengarahkan pembangunan *e-gov* di daerah. Padahal pembangunan *e-gov* memerlukan kesamaan visi antara pusat dan daerah, maupun antar daerah.
5. Sampai saat ini pembangunan *e-gov* belum mempunyai payung hukum yang kuat yang dapat mengatur pemerintah daerah karena hanya berbentuk inpres, oleh karena itu harus dibuat payung hukum yang lebih kuat dalam bentuk Keputusan Presiden yang dapat mengatur pemerintah daerah dalam rangka pembangunan *e-gov*.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi menjadikan pemerintahan yang *good government* pemerintah Pusat dan Daerah

- perlu menuangkan kebijakan, strategi, program maupun kegiatan untuk membangun TIK dan E gov yang jelas sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Perlu dibentuk lembaga yang mempunyai kewenangan yang jelas dari pusat maupun daerah yang dapat mengarahkan pembangunan e gov agar terdapat kesamaan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan e gov.
 3. Perlu diterbitkan payung hukum yang kuat minimal berbentuk kepres agar mempunyai kewenangan untuk mengatur pembangunan e gov dari pusat sampai daerah.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimmy, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Press
- Garson, David G, 2008, *Handbook of Research on Public Information Technology*, New York, Information Science Reference.
- Indrajit, Richardus, 2004, *Electronic Government*, Yogyakarta, Andi Press.
- Indrajit, Richardus, 2005, *Electronic Government in Action*, Yogyakarta, Andi Press
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Lukman, Sampara. 1999. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Reddick, Christopher G. 2004. *A two-stage model of e-government growth: Theories and empirical evidence for U.S. cities, San Antonio USA*, *Journal Government Information Quarterly* 21.
- Reddick, Christopher G, 2009, *Handbook of Research on Strategies for Local E-Government Adoption and Implementation: Comparative Studies*, New York, Information Science Reference